



Article Informations
Corresponding Email:
deviameliaa.s@gmail.com

Received: 27/08/2025; Accepted:
11/01/2026; Published: 26/02/2026

PERAN PEACEKEEPER PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO TAHUN 2019-2024

Devi Amelia Susanti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran peacekeeper perempuan Indonesia dalam penanganan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2019–2024. Fokus utama penelitian adalah kontribusi kontingen perempuan Indonesia yang tergabung dalam misi MONUSCO, khususnya dalam upaya perlindungan warga sipil, pendampingan korban, serta implementasi agenda *Women, Peace, and Security* (WPS). Kajian ini menggunakan pendekatan teori Liberalisme Institusional dan konsep peran organisasi internasional menurut Clive Archer, yakni forum, instrumen, dan aktor. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti bagaimana kehadiran peacekeeper perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dalam menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan di wilayah konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa peacekeeper perempuan Indonesia mampu membangun kepercayaan masyarakat lokal melalui pendekatan yang empatik dan sensitif terhadap gender, sehingga memperkuat efektivitas misi PBB dalam perlindungan sipil. Selain itu, keberadaan mereka turut meningkatkan legitimasi misi perdamaian, memperkuat diplomasi normatif Indonesia, serta berkontribusi pada perubahan norma internasional mengenai keterlibatan perempuan dalam operasi perdamaian. Temuan ini menegaskan pergeseran peran Indonesia dari sekadar kontributor simbolis menuju aktor substantif dalam agenda perdamaian global.

Kata Kunci: Peacekeeper Perempuan, Indonesia, Kongo, dan MONUSCO.

Abstract

This study examines the role of Indonesian female peacekeepers in addressing exploitation and violence against women in the Democratic Republic of the Congo (DRC) during the period 2019–2024. The primary focus is the contribution of Indonesian female contingents within the MONUSCO mission, particularly in civilian protection, victim assistance, and the implementation of the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. The research employs Institutional Liberalism theory and Clive Archer's concept of the roles of international organizations—forum, instrument, and actor. Using a descriptive qualitative method based on library research, the study highlights that

the presence of female peacekeepers is not merely symbolic but substantive in fostering a sense of security for women and children as the most vulnerable groups in conflict zones. The findings demonstrate that Indonesian female peacekeepers are able to build trust with local communities through empathetic and gender-sensitive approaches, thereby enhancing the effectiveness of UN peacekeeping missions in civilian protection. Moreover, their presence strengthens the legitimacy of peace operations, advances Indonesia's normative diplomacy, and contributes to the evolution of international norms regarding women's involvement in peacekeeping missions. These findings affirm Indonesia's shift from being a symbolic contributor to becoming a substantive actor within the global peace and security agenda.

Keywords: *Female Peacekeeper, Indonesian, Congo, and MONUSCO.*

PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) telah melahirkan berbagai bentuk krisis kemanusiaan, salah satunya adalah tingginya angka eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui misi MONUSCO memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil. Namun, ironisnya, sebagian pasukan penjaga perdamaian justru terlibat dalam praktik eksploitasi seksual, sehingga menimbulkan dilema kredibilitas misi PBB. Untuk menjawab tantangan tersebut, partisipasi peacekeeper perempuan, termasuk dari Indonesia, semakin ditingkatkan. Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Sub-Sahara yang telah lama dilanda konflik berkepanjangan sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Akar dari konflik tersebut tidak hanya terletak pada perebutan kekuasaan dan konflik etnis, tetapi juga dipicu oleh perebutan terhadap kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti emas, coltan (biji logam hitam), dan berlian.

Situasi semakin memburuk akibat campur tangan negara-negara tetangga seperti Rwanda dan Uganda, terutama setelah peristiwa Genosida Rwanda tahun 1994 yang memaksa jutaan milisi Hutu mengungsi ke wilayah timur Kongo.

Indonesia sebagai salah satu negara kontributor terbesar dalam misi penjaga perdamaian PBB mengirimkan personel perempuan yang berperan dalam pendekatan sensitif gender, membangun kepercayaan masyarakat, serta menangani kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Artikel ini berupaya menganalisis bagaimana peacekeeper perempuan Indonesia berperan dalam konteks tersebut dengan menggunakan kerangka teori liberalisme institusional dan konsep organisasi internasional Clive Archer.

PEMBAHASAN

Peran Peacekeeper Perempuan Indonesia dalam Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan terhadap Perempuan di RDK

Sebagai bagian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) peacekeeper memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong partisipasi perempuan dalam operasi peacekeeping. Peran ini diwujudkan melalui agenda *WPS (Women, Peace and Security)* yang dimulai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tahun 2000. Resolusi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam implementasi di lapangan.

Keterlibatan perempuan dalam peacekeeping juga dipandang strategis oleh PBB karena mampu meningkatkan efektivitas misi. Perempuan peacekeepers dianggap lebih mudah membangun komunikasi dengan komunitas lokal, khususnya dengan perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok rentan. Selain itu, keberadaan mereka berkontribusi dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus eksploitasi dan kekerasan seksual yang kerap terjadi di wilayah konflik. Sejumlah resolusi lanjutan, seperti Resolusi 1888 tahun 2009 dan Resolusi 2106 tahun 2013, semakin mempertegas mandat PBB untuk menempatkan penasihat gender (*gender advisers*) serta membentuk unit perlindungan perempuan dalam setiap misi perdamaian. (UN Council, 2009)

Sejak awal keterlibatannya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia telah memperkuat kontribusinya tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam hal kesetaraan gender, khususnya melalui pengiriman peacekeeper perempuan. Dalam periode 2019–2024, kontingen Indonesia yang bertugas di MONUSCO di Republik Demokratik Kongo mencerminkan transformasi nyata dari simbolis menjadi substantif. Yang mana awalnya,

kehadiran peacekeeper perempuan Indonesia di misi PBB lebih sering dipandang sebatas simbol keterwakilan gender saja, yakni untuk menunjukkan bahwa Indonesia mendukung agenda kesetaraan gender PBB dan resolusi *UNSCR 1325 on Women, Peace, and Security*. Dalam konteks ini, perempuan dikirim untuk “ada” di lapangan, tetapi peran strategis dan operasionalnya belum banyak dioptimalkan. Namun, dalam perkembangannya terutama pada periode 2019–2024, peacekeeper perempuan Indonesia di MONUSCO mulai terlibat secara substantif dalam pelaksanaan mandat misi: mereka memimpin patroli komunitas, menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender, melakukan kegiatan community engagement, memberikan layanan medis, hingga mendukung mekanisme perlindungan korban eksploitasi seksual.

Dalam jurnal yang berjudul “*The Role of Indonesia’s Female Peacekeepers in United Nations Peacekeeping Operations to Promote Gender Equality*” Dikatakan bahwa keterlibatan peacekeeper perempuan tidak bersifat simbolik: mereka ditempatkan pada fungsi-fungsi inti seperti CIMIC (*Civil–Military Cooperation*), komunikasi-komunitas, pelayanan medis, hingga dukungan dokumentasi/rujukan kasus kekerasan seksual sesuai protokol PBB, yang secara empiris meningkatkan akses warga terutama perempuan dan anak ke mekanisme aduan dan layanan perlindungan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasukan perdamaian PBB yang bertugas di negara berkonflik. (Fadillah, 2020)

Data resmi PBB menunjukkan bahwa per 31 Mei 2024 Indonesia menugaskan 180 personel perempuan berseragam (dari total 2.740) di berbagai operasi, mencerminkan konsistensi peningkatan pasca-2019 serta selaras dengan target Paritas Gender Berseragam PBB 2018–2028. Sebagai salah satu aktor utama di bawah naungan PBB, UN Women memiliki mandat strategis untuk memperkuat implementasi agenda WPS (*Women, Peace, and Security*). Peran ini sangat penting, terutama dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam operasi perdamaian, termasuk dari Indonesia yang secara konsisten mengirimkan kontingen militer dan polisi ke misi PBB. UN Women berfungsi sebagai penghubung antara kerangka kebijakan global dengan implementasi nasional melalui berbagai mekanisme, salah satunya

adalah penyusunan *National Action Plan on Women, Peace and Security (NAP WPS) 2020–2025* di Indonesia. Dokumen ini menjadi instrumen kebijakan penting yang menekankan pencegahan, perlindungan, partisipasi, serta pemulihan korban konflik, dengan mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan pertahanan dan keamanan.

Selain pada level kebijakan nasional, UN Women juga menjalankan peran penting dalam membangun jejaring dan kapasitas di lapangan. Misalnya, kerjasama UN Women dengan Wahid Foundation dalam program *Peace Villages* di Indonesia tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan di tingkat komunitas untuk mencegah radikalisme dan kekerasan, tetapi juga menyediakan model berbasis lokal yang kemudian dapat diadopsi dalam kerangka operasi perdamaian internasional.

Program semacam ini secara tidak langsung memperkuat peacekeeper perempuan Indonesia karena mereka membawa perspektif baru yang lebih inklusif dan responsif gender ketika ditempatkan dalam misi PBB seperti MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Hal ini sejalan dengan strategi PBB yang menargetkan peningkatan jumlah peacekeeper perempuan hingga 15% pada pasukan militer dan 25% pada pasukan polisi, sebagaimana ditegaskan dalam *Uniformed Gender Parity Strategy 2018–2028*.

Peacekeeper perempuan Indonesia yang dikirim melalui mekanisme PBB dengan dukungan UN Women tidak lagi sekadar menjalankan fungsi simbolis sebagai representasi gender, tetapi benar-benar menjalankan mandat substantif: melakukan patroli komunitas, berinteraksi dengan perempuan dan anak di daerah konflik, memberikan edukasi hak-hak perempuan, serta berperan langsung dalam mekanisme perlindungan para korban di negara yang sedang berkonflik.

Dengan demikian, keterlibatan UN Women sebagai aktor PBB menunjukkan bahwa keberhasilan kontribusi peacekeeper perempuan Indonesia bukan hanya hasil dari kebijakan domestik, tetapi juga buah dari kerangka kerja internasional yang memfasilitasi, melatih, dan memastikan implementasi prinsip kesetaraan gender dalam operasi perdamaian. Peran ini menegaskan bahwa peacekeeper perempuan Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai representasi negara, tetapi juga sebagai agen global yang mewujudkan agenda PBB dalam menciptakan perdamaian.

Peran Peacekeeper Perempuan Indonesia melalui Aktor: PBB dan UN Women

Berlandaskan kerangka peran organisasi internasional menurut Clive Archer, kontribusi peacekeeper perempuan Indonesia di Republik Demokratik Kongo (RDK) melalui PBB dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni forum, instrumen, dan aktor. Pertama, sebagai forum, PBB melalui agenda Women, Peace, and Security (WPS) yang dimulai dengan Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) serta resolusi lanjutan 1888 (2009) dan 2106 (2013), menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam perdamaian dan keamanan, termasuk dengan menempatkan penasihat gender serta unit perlindungan perempuan di setiap misi multidimensional. Kedua, sebagai instrumen, pengiriman peacekeeper perempuan Indonesia oleh PBB ke MONUSCO periode 2019–2024 mencerminkan transformasi dari kehadiran simbolis menjadi peran substantif: mereka terlibat dalam patroli komunitas, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, community engagement, layanan medis, hingga mekanisme perlindungan korban eksploitasi seksual. Keterlibatan ini sesuai dengan temuan dalam berbagai studi yang menunjukkan peacekeeper perempuan lebih dipercaya oleh masyarakat lokal

dan mampu menjembatani norma sosial, sehingga meningkatkan efektivitas misi DDR (disarmament, demobilisation, reintegration) dan mandat perlindungan sipil. Data PBB per Mei 2024 mencatat Indonesia telah menugaskan 180 personel perempuan dalam berbagai operasi, mendukung target *Uniformed Gender Parity Strategy 2018–2028*. Ketiga, sebagai aktor, PBB melalui UN Women memperkuat peran peacekeeper perempuan Indonesia dengan dukungan teknis, pelatihan berbasis gender, penguatan kepemimpinan, serta penyusunan *National Action Plan on Women, Peace and Security* (NAP WPS) 2020–2025 di Indonesia. Selain itu, kerjasama UN Women dengan organisasi lokal seperti Wahid Foundation dalam program *Peace Villages* turut membekali perempuan Indonesia dengan perspektif inklusif yang kemudian diterapkan dalam misi internasional. Dengan demikian, peacekeeper perempuan Indonesia tidak hanya hadir sebagai representasi negara, tetapi juga sebagai agen global yang mewujudkan agenda kesetaraan gender PBB dalam menciptakan perdamaian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan korban eksploitasi dan kekerasan seksual.

UN Women memiliki mandat strategis untuk memperkuat implementasi agenda WPS (*Women, Peace, and Security*). Peran ini sangat penting, terutama dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam operasi perdamaian, termasuk dari Indonesia yang secara konsisten mengirimkan kontingen militer dan polisi ke misi PBB. UN Women berfungsi sebagai penghubung antara kerangka kebijakan global dengan implementasi nasional melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah penyusunan

National Action Plan on Women, Peace and Security (NAP WPS) 2020–2025 di Indonesia. Dokumen ini menjadi instrumen kebijakan penting yang menekankan pencegahan, perlindungan, partisipasi, serta pemulihan korban konflik, dengan mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Melalui dukungan teknis, riset, dan advokasi, UN Women memastikan agar peacekeeper perempuan Indonesia diperlengkapi dengan kapasitas yang sesuai, mulai dari pelatihan berbasis gender, peningkatan kepemimpinan, hingga pembekalan untuk menghadapi situasi darurat terkait kekerasan seksual dan berbasis gender SGBV (*Sexual and Gender Based Violence*)

Bentuk-Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di RDK

1. Kekerasan berbasis gender (*Gender-Based Violence*)

Kekerasan berbasis gender (*Gender-Based Violence*) di RDK merupakan cerminan dari ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakar dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Kongo. Dalam konteks konflik bersenjata yang telah berlangsung sangat lama, GBV tidak hanya menjadi efek samping, melainkan telah menjelma sebagai strategi yang digunakan untuk menundukkan, mempermalukan, dan mengendalikan komunitas sipil, terutama perempuan dan anak perempuan. Menurut laporan OIOS (*Office of Internal Oversight Services*) PBB, antara tahun 2007 sampai tahun 2021, RDK menjadi salah satu negara dengan laporan kasus kekerasan seksual oleh pasukan PBB terbanyak di dunia, dan mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan eksploitasi terhadap

perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem atau situasi pengungsian. Dalam satu kasus terkenal, pada tahun 2016, penyelidikan mengungkap bahwa lebih dari 100 perempuan dan gadis muda di kota Bambari dan Bangui salah satu kota yang terletak di Kongo mengaku dipaksa berhubungan seksual oleh pasukan PBB, beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur yang diberi makanan, uang, atau perlindungan sebagai imbalan. (United Nations Peacekeeping, 2021)

2. DISKRIMINASI TERHADAP PENDIDIKAN DAN EKONOMI PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Diskriminasi struktural terhadap perempuan di RDK juga sangat nyata terlihat dari keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Tingkat pendidikan pada anak perempuan rendah akibat faktor-faktor seperti kemiskinan, pernikahan dini, tanggung jawab domestik, dan budaya tradisional yang lebih mementingkan pendidikan untuk anak laki-laki. Analisis *microeconomics* menggunakan metode Oaxaca-Blinder menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di rumah tangga yang dipimpin perempuan jauh lebih rendah, dan ketercapaian pendidikan signifikan mempengaruhi pendapatan dalam rumah tangga perempuan. (Broccolini, 2024)

Kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan di RDK merupakan dampak dari diskriminasi struktural yang kompleks dan saling berkelindan. Meskipun tingkat partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja mencapai 62%, data World Bank menunjukkan bahwa hanya 6,4% dari mereka yang bekerja di sektor formal bergaji, jauh tertinggal dibandingkan laki-laki sebesar 23,9%. Dengan kata lain, meskipun para perempuan bekerja, mereka tetap mengalami

ketimpangan dalam jenis pekerjaan yang bisa mereka akses, dan ini merupakan cerminan dari diskriminasi struktural yang menyebabkan ketidakadilan atau ketimpangan terhadap kelompok tertentu, dalam hal ini adalah perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai peran peacekeeper perempuan Indonesia di Republik Demokratik Kongo periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mereka memberi kontribusi signifikan dalam misi perdamaian PBB. Kehadiran peacekeeper perempuan tidak lagi bersifat simbolis, tetapi substantif dalam menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan. Melalui pendekatan empatik dan sensitif gender, mereka mampu membangun kepercayaan masyarakat lokal serta mendukung proses pendampingan dan pemulihan trauma secara lebih efektif dibanding personel laki-laki.

Dukungan Resolusi DK PBB 1325 serta kebijakan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia memperkuat peran mereka, menjadikan peacekeeper perempuan bukan sekadar representasi negara, melainkan wujud diplomasi normatif Indonesia. Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah personel, minim fasilitas, dan resistensi budaya lokal, kontribusi mereka tetap menunjukkan bahwa Indonesia telah bertransformasi dari kontributor simbolis menjadi aktor substantif dalam agenda *Women, Peace, and Security*.

DAFTAR PUSTAKA

Broccolini, Chiara, Anna Fruttero, and Saanya Jain. "Chapter 1 Revisiting Trends in Gender Equality." CH001. USA: International Monetary Fund, 2024. Available: <https://www.elibrary.imf.org/view/book/9798400246968/CH001.xml>.

Fadillah, Yulia et al. "The Role of Indonesia Female Peacekeeper in United Nations Peacekeeping Operations to Promote Gender Equality." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nationalism dan Integrity* 6.2 (2020): 118–128. Online. Internet. 25 Aug. 2025. Available: <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/756>.

United Nations Peacekeeping 2021 Report: Special measures for protection from sexual exploitation and abuse n.d. Online. Available: <https://peacekeeping.un.org/en/2021-report-special-measures-protection-sexual-exploitation-and-abuse>.

United Nations Security Council. *Resolution 1888 on Women, Peace and Security*. UN Doc. S/RES/1888, 30 Sept. 2009; United Nations Security Council. *Resolution 2106 (2013) on Women, Peace and Security*. UN Doc. S/RES/2106, 24 June 2013.

